

**PERANAN CAMAT DALAM PROSES KEPEMIMPINAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani



Oleh :

H A Y A D I
NPM : 1787/0899/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan Camat dalam Proses Kepemimpinan terhadap
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

Diajukan Oleh : HAYADI


Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum

Nomor Mahasiswa : 1787/0899/FH/04

Disetujui tanggal : _____

1. ABDUL MUHID,SH.MH.
NIDN. 0831126914
Pembimbing I

()

2. TAMRIN, SH.
NIDN. 0801076601
Pembimbing II

()

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Pajak bumi dan bangunan adalah merupakan pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak yaitu tanah dan bangunan, baik yang dipegang oleh pemilik maupun orang lain yang terpenting mendapatkan hasil dari sesuatu yang ditimbulkan oleh obyek pajak tersebut.
2. Mengingat pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, karena hasil penerimaan dari perpajakan langsung masuk ke kas negara guna membiayai pembangunan. Dengan demikian, maka penerimaan dari sektor perpajakan sangat vital, pelaksanaannya harus diambil dari suatu kebijakan yang rasional mengingat pengambilan pajak dari masyarakat menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Camat sebagai pimpinan di wilayahnya harus mampu mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga Camat dan perangkatnya mampu berperan sebagai katalisator penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa. Di samping itu dapat

berfungsi sebagai koordinator untuk pemerintahan desa, pelaksana program pembangunan lintas desa

B. Saran-saran

1. Untuk mendapatkan data yang akurat tentang subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan perlu terus diadakan pendataan melalui aparat terkait, agar dapat ditetapkan secara tepat jumlah subyek / obyek pajak sehingga secara mudah dapat menetapkan SPPT/SKP.
2. Agar terciptanya tertib administrasi dan/atau dapat dicapainya efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak, perlu ditingkatkan tentang pendataan dan penyuluhan baik bagi pelaksana maupun para wajib pajak.
3. Meningkatkan peranan camat sebagai pimpinan di wilayahnya dalam upaya peningkatan pencapaian target pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan dengan memberikan wewenang dan kontribusi yang lebih besar kepada camat dan aparat di bawahnya.